

ABSTRAK

YUNUS. Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara). (Dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan Burhanuddin)

Sistem lelang jabatan adalah metode pengisian jabatan struktural yang telah diatur pada tahun 2012 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah.

Jenis penelitian adalah kualitatif yang akan mendeskripsikan data-data empirik yang memuat gejala sosial dan informannya sebanyak enam orang pegawai. Teknik pengumpulan datanya berupa: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan lelang jabatan diperoleh bahwa 1) Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik, Komersialisasi jabatan dalam penempatan jabatan yang dilakukan oleh tim sukses Bupati terhadap oknum-oknum pejabat, adanya politik transaksional atau politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran Pemerintah Daerah, dan marginalisasi Baperjakat dalam mekanisme penempatan jabatan di jajaran Pemerintah Daerah justru kebalikan dari mekanisme yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 2) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi politisasi birokrasi yang terjadi di Pemerintah Daerah, antara lain: Kepentingan kekuasaan atau politik kepala daerah, hubungan patron client antara Kepala Daerah dan para birokratnya sebagai bentuk loyalitas birokrat terhadap pemimpinnya dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi atau sekedar mengamankan posisi birokrat tersebut dalam jajaran Pemerintah, nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan dalam lingkungan Pemda, dan menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan didasarkan untuk memperluas kekuasaannya untuk periode berikutnya.

Kata kunci: politisasi, pemilihan kepala daerah, dinas pendidikan.